

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI ISLAM DAN PERGURUAN TINGGI UMUM

Oleh: N. Atiyah

Abstrak

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Ada empat asas dalam pengembangan kurikulum yaitu asas filosofis, sosiologis, organisatoris dan psikologis. Selain itu, terdapat empat pendekatan dalam pengembangan kurikulum di antaranya, yaitu pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistic, pendekatan teknologi, dan pendekatan rekonstruksi social. Untuk meningkatkan mutu PTAI, maka kurikulum yang diterapkan perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan asas-asas pengembangan kurikulum di atas. Pengembangan kurikulum PTAI harus berbasis kompetensi, agar lulusannya memiliki kompetensi handal sesuai bidang garapannya. ¹Pemerintah menempatkan pendidikan agama sebagai khasanah bangsa yang harus dilestarikan dan ditumbuhkembangkan di kalangan generasi muda. Dalam setiap jenjang pendidikan, agama menjadi mata pelajaran wajib tanpa kecuali. Tuntunan ke arah itu cukup beralasan. Pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah/ perguruan Tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai aktivitas dan PAI sebagai fenomena. Pada domain yang pertama dimaksudkan bahwa PAI sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup dan kehidupannya, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Sedangkan PAI sebagai fenomena merupakan peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau penciptaan suasana yang dampaknya kepada berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.

¹ M. Naquib al-Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 255

Kata kunci: *Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, PTAI, Kompeten*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses ganda, bagian pertamanya adalah melibatkan masuknya unit-unit makna suatu objek pengetahuan ke dalam jiwa seseorang dan yang kedua melibatkan sampainya jiwa pada unit-unit makna tersebut. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pendidikan, jelas diperlukan adanya jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut. Adapun sarana atau jalan dalam istilah pendidikan sering disebut dengan kurikulum. Pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah/ perguruan Tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai aktivitas dan PAI sebagai fenomena.²

Pada domain yang pertama dimaksudkan bahwa PAI sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup dan kehidupannya, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Sedangkan PAI sebagai fenomena merupakan peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau penciptaan suasana yang dampaknya kepada berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.

Hampir dalam setiap pergantian presiden, kurikulum mengalami perubahan, akan tetapi *out come*-nya masih jauh dari harapan, bahkan sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan kita dianggap kelinci percobaan. Memang perubahan atau pengembangan perlu dilakukan, namun konsep perubahan itu jangan mengesampingkan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik. Begitu juga dengan kurikulum PAI yang ikut menjadi korban perubahan dalam pelaksanaannya. Padahal PAI mempunyai tempat yang sangat strategis pada semua jalur dan jenjang pendidikan persekolahan. PAI merupakan bidang ajaran kajian yang sangat penting dan fundamental dalam pembentukan manusia secara utuh, berwawasan ilmu pengetahuan tinggi, cakap dan terampil, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. PAI memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sebagai tata nilai, pedoman, pembimbing dan pendorong atau penggerak untuk mencapai kualitas hidup yang lebih layak dan kebahagiaan hidup dunia akhirat.

² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

Hampir dalam setiap pergantian presiden, kurikulum mengalami perubahan, akan tetapi *out come*-nya masih jauh dari harapan, bahkan sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan kita dianggap kelinci percobaan. Memang perubahan atau pengembangan perlu dilakukan, namun konsep perubahan itu jangan mengesampingkan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik. Begitu juga dengan kurikulum PAI yang ikut menjadi korban perubahan dalam pelaksanaannya. Padahal PAI mempunyai tempat yang sangat strategis pada semua jalur dan jenjang pendidikan persekolahan. PAI merupakan bidang ajaran kajian yang sangat penting dan fundamental dalam pembentukan manusia secara utuh, berwawasan ilmu pengetahuan tinggi, cakap dan terampil, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. PAI memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sebagai tata nilai, pedoman, pembimbing dan pendorong atau penggerak untuk mencapai kualitas hidup yang lebih layak dan kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Pemerintah menempatkan pendidikan agama sebagai khasanah bangsa yang harus dilestarikan dan ditumbuhkembangkan di kalangan generasi muda. Dalam setiap jenjang pendidikan, agama menjadi mata pelajaran wajib tanpa kecuali. Tuntunan ke arah itu cukup beralasan untuk mengiring proses pendidikan agama agar mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kepribadian peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Bertolak dari pemaparan di atas artikel ini akan membahas tentang makna kurikulum PAI, asas dan ciri-ciri kurikulum PAI, bagaimana model-model pengembangan kurikulum secara umum dan model pengembangan kurikulum PTAI berbasis kompetensi.

B. Model Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis

Kompetensi

Model menurut wikipedia adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskansuatu obyek, sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idelisasi. Bentuknya dapat model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.

Pengertian pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional.³

³ Wisnucorner.blogs.uny.ac.id diakses pkl 14.30 wib

Kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen dan penuh tanggung jawab³⁴ yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kaitannya dengan kurikulum di Perguruan Tinggi Umum atau PTAI memang harus berbeda dengan Kurikulum Pendidikan Dasar. Dalam lingkup pendidikan dasar harus lebih menekankan pada pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai agama, budaya dan karakter bangsa harus ditanamkan pada masa-masa awal perkembangan kejiwaan peserta didik agar memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi masa-masa rawan timbulnya, dekadensi moral dan kenakalan re-maja serta dalam rangka bersosialisasi dengan lingkungannya yang lebih luas. Kemudian tepat sekali jika kurikulum PTAI menekankan kepada kompetensi peserta didik yang mengacu kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian karena mengingat peserta didik PTAI (khususnya LPTK/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) adalah calon-calon guru/pendidik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat relevansi dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang yang dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu memerlukan: 1) *Basic skill: reading, writing, arithmetic & mathematics, speaking and listening*; 2) *Thinking skill: thinking creatively, making decisions, solving problems, visualizing things in the mind's eye, knowing how to learn & reasoning*; 3) *personal quality: individual responsibility, self esteem, sociability, self management & integrity*. Ketiga kemampuan atau kecakapan tersebut harus termuat dalam pengembangan kurikulum. Perguruan tinggi secara umum, baik perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi agama Islam memiliki otonomi sendiri dalam pengembangan kurikulum. Melalui regulasi UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi keleluasaan pada satuan pendidikan tinggi untuk merumuskan kurikulum yang khas-distingtif. ⁴Keniscayaan pengembangan kurikulum PTAI kepada kurikulum berbasis kompetensi bertujuan untuk meningkatkan mutu PTAI, karena menurut Direktur Pertais mutu lulusan PTAI dianggap masih kurang memenuhi harapan masyarakat, dan sumbangannya pada pengembangan ilmu agama Islam masih dianggap kurang signifikan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kelemahan kurikulum PTAI, yaitu (kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat: banyak program studi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; (2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan; (3) kurang

⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafi

efisien, yakni banyaknya mata kuliah dan sks tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai harapan; (4) kurang fleksibel, yakni PTAI kurang berani secara kreatif dan bertanggung jawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (setempat, nasional atau global); (5) *readability* rendah tidak komunikatif (bisa menimbulkan banyak tafsir); (6) hanya berubah deretan mata kuliah; (7) berbasis (berfokus) pada mata kuliah/penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler/hasil belajar/mutu lulusan; dan (8) hubungan fungsional antarmata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, maka Direktur Pertais mengambil kebijakan tentang pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Kurikulum berbasis hasil belajar
2. Kurikulum terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional
3. Kurikulum inti 40% ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional sedangkan kurikulum institusional (60%) ditetapkan oleh PTAI dan berlaku hanya di PTAI tersebut.
4. Kurikulum secara keseluruhan (inti dan institusional) ditetapkan oleh PTAI
5. Kualitas kurikulum menjadi tanggung jawab PTAI.

Kebijakan tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kurikulum perlu dikembangkan dengan lebih menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi dari pada penguasaan materi.
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia.
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di PTAI untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
4. Menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.
5. Pengembangan kurikulum memuat sekelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPB) pada semua program studi, serta dari adanya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan agar:
 1. Mutu pendidikan lebih terjamin;
 2. Lebih dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja; dan
 3. Peran PTAI sebagai agen perubahan masyarakat dapat lebih memenuhi.

Perlu dimaklumi bahwa apa yang penulis paparkan di atas adalah sebuah semangat dari implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang sudah 10 tahun yang lalu meninggalkan kita dan lembaga pendidikan, kemudian diganti KTSP 7 tahun menemani kita dan sudah hampir 2 tahun hampir kita lupakan sedangkan sekarang sudah dimplementasikan

kurikulum baru yang lebih dikenal dengan K-13 atau kuri-kulum 2013. Menurut penulis perlu juga PTAI melakukan perombakan atau perubahan sebagai pembaharuan dan pengembangan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kurikulum 13 dalam rangka meningkatkan mutu PTAI dan mutu lulusannya. Dalam hal ini penulis senada dengan apa yang disampaikan Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Mastuki), yang mengatakan pentingnya merombak Kuri-kulum Perguruan Tinggi Islam seperti dinyatakan dalam beberapa alinea berikut:

“Kurikulum PTAI memang perlu dirombak. Perlu pembaharuan dan penyesuaian. Bukan karena latah (ikut-ikutan, Jawa.) karena saat ini sedang hangat-hangatnya penerapan Kurikulum 2013.

Perombakan kurikulum PTAI lebih disebabkan karena kebutuhan internal dan tantangan eksternal yang berubah sangat dinamis. PTAI tidak bisa menjadi menara gading yang lepas dari „dunia luar“. PTAI adalah bagian dari institusi sosial (*social institutions*) yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu institusi, misalnya perkembangan politik atau ekonomi mengakibatkan perubahan pada institusi pendidikan. PTAI juga merupakan bagian komunitas dunia yang terus bergerak. Globalisasi berikut dampak iringannya (*nurturant effect*) sedikit banyak „menggoyang“ pertahanan PTAI. Pada aras inilah perombakan kurikulum menemukan titik terangnya.

Lebih lanjut, Mastuki menyatakan bahwa “kurikulum memang bukan satu-satunya faktor pendidikan. Ada komponen pendidik/dosen, mahasiswa/peserta didik, materi pembelajaran, metodologi, sumber belajar, dan komponen lainnya. Kurikulum juga hanyalah *tools* untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni tujuan pendidikan itu sendiri. Namun, pentingnya *updating* atau perombakan kurikulum karena melalui *tools* inilah proses-proses pendidikan dapat dinilai, dievaluasi, diukur, dipahami, dicandera, direvisi jika perlu, atau diperbaiki.”

Pentingnya pengembangan kurikulum PTAI juga disuarakan Prof. Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Maliki Malang. Sebagaimana dikutip Mastuki, Imam Suprayogo mengatakan “segera dilakukan pembaharuan kurikulum, termasuk cara pandang tentang Islam”. Lebih lanjut Guru Besar UIN Malang itu mengungkapkan, “Lewat kurikulum (PTAI) yang ada selama ini, Islam hanya dilihat dari perspektif syaria’h, ushuluddin, dakwah, tarbiyah, atau dari fiqh, tauhid, akhlak, dan tasawuf terasa sudah tidak memadai lagi”. Dengan kenyataan ini, “Islam akhirnya dikesankan menjadi ajaran yang sempit. Padahal semestinya, Islam juga menyangkut aspek-aspek pendidikan yang luas, seluas kehidupan itu sendiri”, tegasnya.

Lebih lanjut, Mastuki mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman, ada beberapa langkah praktis perombakan kurikulum yang dapat dilakukan di PTAI. Level pertama dan tersulit, perumusan visi dan misi yang jelas lalu diikuti rumusan tujuan dan indikator yang dapat dicapai. Langkah ini memerlukan waktu lama dan melibatkan banyak pihak (internal, eksternal: *stakeholders/users*), dan biasanya tidak sabar dengan proses ini. Karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Banyak pula pendapat yang perlu diakomodir. Sehingga banyak visi dan misi dirumuskan „hanya kata-kata“ tapi kehilangan ruh, “mudah dibaca, tapi tidak perlu”. Merumuskan visi dan misi ini memang gampang-gampang susah. Karena perlu sedikit mengernyitkan kening, kebanyakan lembaga akhirnya mengambil jalan pintas: rumuskan saja, yang penting ada.

Langkah berikutnya, menetapkan profil lulusan dan kompetensi lulusan. Profil lulusan menjawab pertanyaan: jadi apa lulusan PTAI? Sedangkan kompetensi lulusan, menjawab pertanyaan: bisa apa maha siswa/peserta didik? Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, misalnya bisa membaca, menerjemahkan, dan memahami al-Qur'an dan kaidah penafsirannya. Lulusan Prodi ini menerjemahkan, dan memahami al-Qur'an dan kaidah penafsirannya. Lulusan Prodi ini bisa menjadi penafsir, penerjemah, pengajar, penulis al-Qur'an, atau pelatih studi al-Qur'an.

Dengan rumusan ini akan mudah memandu struktur kurikulum, kebutuhan mata kuliah, dan substansi ajar apa yang diperlukan mahasiswa/Peserta didik, serta bagai-mana silabus masing-masing mata kuliah itu. Dengan pola ini, penetapan mata kuliah bukan karena common sense penyelenggara atau ketua prodi, misalnya, tetapi betul-betul berdasarkan pada kebutuhan kompetensi dan profil yang diinginkan setiap prodi. Sekali lagi, pengalaman praktis yang saya peroleh, banyak prodi di PTAI yang menetapkan mata kuliah bukan karena pertimbangan kompetensi itu melainkan karena „ada dosen“-nya. Kenapa muncul mata kuliah tafsir tarbawi, manajemen syariah, politik ekonomi misalnya karena common sense saja atau sudah dianggap given dari tahun ke tahun dan ada dosen yang mengampu.

C. MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI UMUM

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkan Tap. MPRS No. II Tahun 1960 dan UU. Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Dengan ketetapan tersebut, eksistensi PAI sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa semakin kuat.

Sebagai bagian dari kurikulum inti perguruan tinggi, mata kuliah PAI tentu tidak lepas dari kontrol Pemerintah. Kurikulum PAI, dengan demikian, tidak bisa lepas dari kepentingan politik yang sedang berkembang pada saat mana kurikulum itu diberlakukan. Sehingga, perbedaan orientasi, visi dan misi sebuah rezim pemerintahan, akan berimplikasi pada muatan kurikulum PAI itu sendiri.

Pada masa Orde Baru, PAI di Perguruan Tinggi Umum berorientasi murni pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif. Domain pembahasannya meliputi tiga pilar utama ajaran Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Inilah yang dijabarkan dalam kurikulum PAI di PTU.

Apakah kurikulum yang demikian masih tetap dipertahankan di era Reformasi? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hingga tahun 2002 muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum masih meneruskan materi yang telah diterapkan pada masa Orde Baru, meskipun mata kuliah ini telah dimasukkan sebagai salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Namun, sejak tahun 2002, muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum mengalami perubahan yang cukup drastis.

Pada bagian berikut, akan diuraikan tentang bagaimana perbedaan yang ada antara kurikulum PAI di PTU tahun 2000 dengan kurikulum PAI di PTU tahun 2002.

Perbedaan Paradigma

Pada dasarnya, penulis tidak menemukan referensi khusus yang membahas paradigma kurikulum PAI, baik kurikulum tahun 2000 maupun kurikulum tahun 2002. Oleh karena itu, dalam membahas masalah ini, penulis melakukan analisis terhadap tujuan dan materi PAI pada kedua kurikulum tersebut untuk menemukan spirit yang dikandungnya dan menjiwai pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dengan demikian kita dapat menemukan paradigma pemikiran yang melatarinya.

Paradigma Kurikulum PAI di PTU Tahun 2000:

Kepmen Diknas Nomor: 232/U/2000, menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa. SK ini menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Perguruan Tinggi yang terdiri atas (a) kurikulum inti, dan (b) kurikulum intruksional. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (b) kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Mata kuliah Pendidikan Agama termasuk dalam kelompok MPK seperti halnya PPKN.

Seiring dengan itu, dalam rumusan penyempurnaan kurikulum mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum, dijelaskan:

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional (Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000).

Rumusan di atas tampak berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam kurikulum PAI di masa Orde Baru. Sebagaimana dideskripsikan dalam GBPP PAI bahwa mata kuliah PAI bertujuan:

Mengkaji dan memberi pemahaman tentang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara individu maupun sosial dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya, aturan itulah yang disebut ayat kauniyah dan tanziliah. Ayat tanziliah inilah yang dirinci pada bahasan akidah, syari'ah, akhlak dan sejarah Islam. Penekanan utama ada pada aplikasi ajaran tersebut pada tingkah laku keseharian, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah S.A.W⁵

Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum PAI di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih) dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata pelajaran Agama Islam pada Tingkat Dasar dan Menengah (Balitbang Depdiknas dalam <http://puspendik.com> dan Supriyadi dalam <http://digilib.itb.ac.id/gdl>). Meskipun ada perkembangan materi pada tingkat perguruan tinggi, perkembangan tersebut lebih bersifat vertikal yakni materi yang telah dipelajari pada tingkat sebelumnya lebih dipertajam, dengan pendekatan rasional filosofis. Akan tetapi tidak ada perkembangan yang bersifat horizontal, dalam memperluas wilayah kajian pada isu-isu kontemporer.

⁵ GBPP PAI dalam <http://bima.ipb.ac.id>.

Dengan kondisi yang demikian, tidak dapat dihindari dominannya pendekatan doktriner dalam proses pembelajaran PAI tersebut. Ajaran agama sebagai sesuatu yang harus diimani, diterima tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap pakai.

Paradigma kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 2000 tersebut masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru. Wilayah keislaman terkesan begitu sempit, seputar rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan seperangkat aturan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, konsep keagamaan cenderung bersifat statis karena sekedar melanjutkan tradisi teologis dari para ulama terdahulu.

Mungkinkah paradigma yang demikian ini sengaja ditanamkan penguasa pada masa Orde Baru untuk meredam kekuatan oposisi yang bisa lahir dari pemahaman keagamaan yang dinamis. Kecurigaan seperti ini tentu cukup beralasan, mengingat kurikulum merupakan produk dari penguasa, dan bahwa umat Islam dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan.

Perbedaan Materi Kurikulum

Materi PAI di PTU pada Kurikulum Tahun 2002

Berbeda dengan kurikulum PAI sebelumnya, dalam kurikulum PAI tahun 2002 materi yang disajikan lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di era reformasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan pokok bahasan dan sub bahasan dalam mata kuliah PAI di PTU sesuai yang diamanahkan dalam Keputusan. Dikti No. 38 tahun 2002, tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, pada pasal 4 dijelaskan tentang dasar substansi kajian mata kuliah Pendidikan agama, meliputi:

- Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan
 - o Keimanan dan ketakwaan
 - o Filsafat ketuhanan (teologi)
- Manusia
 - o Hakekat dan martabat manusia
 - o Tanggung jawab manusia
- Moral
 - o Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari
- Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - o Iman, ilmu, amal sebagai kesatuan
 - o Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu
 - o Tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan

- Kerukunan antar umat beragama
 - o Agama merupakan rahmat bagi semua
 - o Hakekat kebersamaan dalam pluralitas beragama
- Masyarakat
 - o Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera
 - o Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi
- Budaya
 - o Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis, bekerja keras dan bersifat fair.
- Politik
 - o Kontribusi agama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara
- Hukum
 - o Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan

- o Peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil
- o Fungsi profetik agama dalam hukum (Dikti, 2002).

Dasar substansi pokok bahasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam pokok bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Agama untuk masing-masing agama, artinya, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi memiliki topik yang sama pada masing-masing agama, topik itulah yang akan diterjemahkan berdasarkan konsep atau persepsi dari setiap agama.

Materi PAI menunjukkan wawasan yang lebih luas sebagai sebuah pandangan hidup yang dinamis dan selalu berdialog dengan konteks sosial. Tidak lagi mengulang-ulang materi pelajaran SLTA ke bawah yang terbatas pada persoalan-persoalan rukun iman dan rukun Islam, sebagaimana halnya pada kurikulum tahun 2000.

Pendidikan Agama Islam di era sekarang, sebagaimana diungkap al-Faruqi (1968:45), dihadapkan kepada perubahan yang mendasar, terutama mempersiapkan peserta didik yang nantinya akan berintegrasi dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses pendidikan agama, ada dua hal sebagai “pekerjaan rumah (PR)”, terutama pendidik agama Islam, yakni: para pendidik tersebut sudah saatnya membutuhkan pengertian yang mendalam dan harus merasa peka terhadap isu-isu pemahaman keagamaan yang sedang berkembang dalam masyarakat umum. Selanjutnya, para pendidik ini harus bisa membantu peserta didik untuk menyadari pentingnya memahami budaya yang bermacam-macam dalam masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

Jika tidak demikian, tampaknya lembaga pendidikan sulit berpartisipasi dalam menengahi model-model pemahaman Islam radikal yang sering dituduh sebagai penyulut munculnya ketidaknyamanan dalam masyarakat beragama. Lembaga-lembaga pendidikan, terutama di masa akan datang, harus bisa memproduksi sarjana Islam yang berpikiran moderat untuk mewedahi berbagai macam pemahaman yang cenderung radikal itu. Untuk mengujudkan itu, seluruh unsur sistem pendidikan Islam, khususnya pembelajaran agama Islam, sebaiknya ditelaah kembali⁶).

Berbagai upaya untuk mengembangkan materi PAI di Perguruan Tinggi Umum saat ini terus digalakkan dengan mengacu pada spirit yang terkandung dalam kurikulum 2002

⁶ Sangkot, 2007 dalam <http://sangkot.wordpress.com>.

tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pendidikan Agama Islam yang berwawasan multikultural.

Paradigma Kurikulum PAI di PTU Tahun 2002

Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, konflik sosial di berbagai daerah, serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, semua itu berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU.

Oleh karena itu, jika pada konsep penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 paradigma yang digunakan masih merupakan warisan Orde Baru maka pada kurikulum 2002 paradigmanya sangat berbeda. Mata kuliah PAI di PTU tidak lagi berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam belaka (bahkan untuk materi ini porsi sangat minim), melainkan lebih dominan mengkaji tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer, seperti, hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum, sistem politik, masyarakat madani dan toleransi antar umat beragama.

Dalam Surat Keputusan Dikti Nomor 38 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: “Visi Matakuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantar mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Dikti, 2002: pasal 1).”

Misi utamanya adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan (Dikti, 2002: pasal 2).

Selanjutnya, kompetensi dasar yang ditargetkan adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual (Dikti, 2002: pasal 3). Sedangkan, untuk tujuan PAI di Perguruan Tinggi Umum, adalah:

Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan (Dikti, 2002, pasal 3 ayat 1).

Dalam rumusan di atas, tidak lagi ditemukan term “iman” dan “takwa” sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum sebelumnya. Sehingga jika rumusan tersebut dibaca tanpa melihat judulnya, tentu tidak ada kesan yang mencerminkan bahwa itu merupakan rumusan tujuan mata kuliah PAI.

Namun, dalam materi instruksional PAI yang diterbitkan oleh Depertais Departemen Agama RI pada tahun 2004 ditegaskan bahwa kompetensi PAI adalah mengantar mahasiswa

untuk (1) menguasai ajaran agama Islam dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya; (2) menjadi “intellectual capital” yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami (Dikti Depag, 2004: vii).

Paradigma yang mendasari kurikulum PAI tahun 2002 ini adalah paradigma yang melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan. Agama bukanlah sekedar seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia.

Agama adalah sebuah pandangan hidup, dan dengan demikian, agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Dan karena realitas selalu dalam proses perubahan maka konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian.

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia di era reformasi, menghendaki lahirnya perubahan paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil, merupakan agenda penting reformasi yang mesti “dibudidayakan” melalui pendidikan.

Di samping itu, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, menuntut peninjauan ulang terhadap cara pandang kita terhadap pluralisme agama, budaya, suku dan etnik. Yang dibutuhkan adalah kesepahaman dalam perbedaan dan bukannya menciptakan keseragaman dalam keragaman sebagaimana yang dilakukan di masa Orde Baru.

Berangkat dari paradigma baru ini, muncullah konsep pendidikan agama yang berwawasan kultural, seperti yang ditawarkan Zakiyuddin Baidhawiy (2007) dalam bukunya Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Konsep ini menawarkan pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dibangun atas semangat kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, menghargai persamaan, perbedaan, keunikan dan independensi. Model pendidikan semacam ini memberikan konstruk baru yang bebas dari prasangka dan stereotipe mengenai agama orang lain, bebas dari bias dan diskriminasi atas nama apapun, baik itu agama, jender, ras, warna kulit, kebudayaan, maupun kelas sosial.

Zakiyuddin Baidhawiy (2007:45-46), menegaskan bahwa: Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para penganut agama-agama menuju satu cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan (united of mankind) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan, dan agama. Pesan kesatuan ini secara tegas disinyalir dalam Alquran: “Katakanlah wahai semua penganut agama (dan kebudayaan),

bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural (kalimatun sawa') antara kami dengan kalian." Kalimatun sawa' bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan, ia adalah manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan (plurality) dan keragaman (diversity) sebagai inti kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikultural diperlakukan setara (equality) dan sama martabatnya (dignity).

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa klaim berlebihan tentang kebenaran absolut kelompok keagamaan sendiri, dan klaim kesesatan atas kelompok-kelompok agama lain, berpotensi meningkatkan sentiment permusuhan antar umat beragama. Penganjur-pengajur dengan pendekatan teologis dogmatis semacam ini dapat dengan mudah membawa dan memicu konflik dan kekerasan pada level pengikut. Dan anehnya, semua mengatasnamakan Tuhan (Baidhawiy, 2007:48).

Pendekatan multikultural dalam pendidikan agama mendapat dukungan luas dari kalangan akademis, sebagai sebuah pendekatan yang tepat dalam merespon konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralis.

Demikianlah, bila dibandingkan dengan kurikulum tahun 2000, dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma yang sangat tajam pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002.

Kepentingan politik, tentu saja memiliki andil dalam hal ini. Penulis beranggapan bahwa pembaruan kurikulum ini, di samping diperuntukkan untuk menyukseskan agenda reformasi dalam hal penegakan HAM, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil, serta memupuk kesadaran akan pluralisme, juga untuk meredam lahirnya kelompok-kelompok radikal yang berbasis Islam. Seperti diketahui, isu terorisme yang ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam "radikal" di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian ekstra serius dari pemerintah Indonesia di era reformasi. Bahkan kelompok-kelompok Islam "radikal" di Indonesia mendapat "pengawasan khusus" dari dunia internasional.

Relevansi Kurikulum PAI Tahun 2002 dengan Kebutuhan Masyarakat

Pembahasan tentang relevansi kurikulum PAI dengan kebutuhan masyarakat, tidaklah dimaksudkan dengan meminta tanggapan langsung dari warga masyarakat, melainkan dengan melihat relevansinya dengan tuntutan situasi dan kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di era Reformasi.

Benturan berbagai ide yang melibatkan elemen-elemen Islam sejak bergulirnya era reformasi muncul dalam berbagai aspek sosial, keagamaan dan politik. Dalam hal ini yang mengemuka antara lain menanggapi soal perempuan jadi presiden, pemberlakuan syariat

Islam, keabsahan demokrasi, pluralisme beragama, makna jihad, hingga persoalan-persoalan politik dan teologi yang lain. Proses dinamis dalam perkembangan kontemporer Islam di Indonesia dan perwajahan baru radikalisme dalam gerakan Islam yang semakin meningkat tentu saja menarik untuk dicermati secara seksama (Mubarak, 2008:114-115).

Baju radikalisme dan fundamentalisme yang dipakai atas nama Islam oleh kelompok tertentu menjadi “boomerang” bagi umat Islam sendiri. Di Indonesia, kedua aliran itu telah menggejala baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Fenomena demikian menyebabkan kekhawatiran berbagai kalangan masyarakat, sebab alur pemikiran semacam itu telah merasuki anak-anak, pelajar dan mahasiswa.

Dalam situs GP Anshor dikemukakan bahwa: Momok ekstrem kanan yang dulu begitu diwaspadai oleh Orde Baru kini hilang dari kamus politik Indonesia. Kelompok Islam radikal memang berhasil “ditumpas” rezim Orde Baru pada tahun 1980-an. Namun, dalam waktu hampir bersamaan generasi di bawahnya diam-diam membangun jaringan di kampus-kampus⁷ Kemudian disusul dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian kampus pada akhir 1980-an yang terkenal dengan sebutan “kelompok tarbiyah,” melalui kelompok inilah transmisi Islam radikal di Timur Tengah berkembang di Indonesia, khususnya di kampus-kampus perguruan tinggi umum

Setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Bagi sebagian kalangan, kemunculannya dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian di antaranya menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya. Kekerasan di sini tak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik, dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim (<http://www.gp-anshor.org>).

Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara plural yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, budaya yang berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Pluralisme yang menjadi ciri bangsa dan Negara Indonesia ini, semestinya diimbangi dengan demokratisasi yang kuat sehingga tidak menimbulkan gejolak baru yang berkembang. Islam sebagai agama yang *matan li al-rahâlamîn* seyogyanya dimaknai oleh penganutnya dengan penuh keramahan, kedamaian, dan kasih sayang. Bukan sebaliknya, seolah-olah Islam menjadi sesuatu yang mengerikan, menyeramkan, dan menakutkan bagi umat lain, sehingga performen keseluruhan

⁷ <http://www.gp-anshor.org>.

umat Islam pun turut terpengaruh. Arogansi, kepongahan, serta kecongkakan yang mementingkan keinginan kelompoknya masing-masing adalah benih dari sebuah bentuk radikalisme. Karena itu, di era global sekarang ini wajah seram semacam itu, tak boleh lagi tumbuh berkembang.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh the Wahid Institute tentang persepsi umat Islam Indonesia terhadap agama Islam dan isu terorisme, diperoleh data bahwa sebanyak 2,7% dari responden percaya bahwa terorisme dibolehkan dalam ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokoknya berpijak pada asumsi-asumsi pluralism. Dan meskipun angka 2,7% itu kecil, tetapi untuk jumlah penduduk yang mencapai sekitar 130 juta maka angka tersebut cukup besar⁸ (JBP dan Yuli Ahmada, dalam <http://rumahkiri.net>).

Oleh karena itu, teramat penting untuk memberikan pemahaman keislaman yang berwawasan luas kepada para generasi muda sehingga tidak mudah terjebak dalam radikalisme yang dilatari oleh sempitnya wawasan keagamaan yang dimilikinya. Tampaknya, inilah salah satu kebutuhan yang coba dijawab dalam kurikulum PAI tahun 2002 tersebut.

Dengan melihat setting sosial masyarakat Indonesia di masa awal reformasi, materi yang ditawarkan dalam kurikulum PAI tahun 2002 tersebut sudah relevan. Masyarakat Indonesia di era reformasi ini membutuhkan pencerahan pemikiran keagamaan yang lebih luas, terutama menyangkut isu-isu krusial yang terjadi dalam negeri. Pemahaman yang benar tentang hak asasi manusia, demokrasi, masyarakat madani, pluralisme agama, ras, budaya, etnik, dan bahasa.

Perubahan iklim politik di Indonesia ke arah yang lebih demokratis juga memberi peluang pada umat Islam untuk menyuarakan aspirasinya termasuk ide-ide yang bernuansa Islami. Oleh karena itu, hubungan Islam dan politik perlu mendapat perhatian dalam kurikulum PAI, khususnya pada level Perguruan Tinggi.

Singkatnya, perubahan paradigma dan materi kurikulum PAI di Perguruan Tinggi tahun 2002, pada dasarnya merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat muslim Indonesia di era reformasi ini. Kurikulum ini juga memungkinkan pendidikan untuk mengantar mahasiswa memahami wacana-wacana global dalam perspektif Islam. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang Islami dalam melihat realitas, sehingga Islam menjadi agama yang hidup dinamis dalam berdialog dengan

⁸ (JBP dan Yuli Ahmada, dalam <http://rumahkiri.net>).

segala bentuk perubahan konteks sosio kultural historis, tanpa harus kehilangan jati diri dan orisinalitasnya. Bila kita meyakini Islam sebagai agama yang terakhir dari Allah swt., kita pun harus yakin bahwa wawasan keislaman akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sepanjang zaman, Islam tidak mungkin statis karena realitas terus mengalami perubahan.

Relevansi Kurikulum PAI Tahun 2002 dengan Kebutuhan Peserta Didik

Istilah kebutuhan peserta didik di sini bukan diartikan sebagai kebutuhan yang bersumber dari keinginan peserta didik secara personal, melainkan kebutuhan berdasarkan asumsi dengan melihat korelasi antara kurikulum PAI di tingkat Perguruan Tinggi dengan kurikulum PAI di tingkat dasar dan menengah. Sebagai ilustrasi, jika seorang anak didik telah mempelajari tata cara berwudu maka kebutuhan selanjutnya adalah materi tentang salat atau tayammum, bukannya tata cara berwudhu lagi, terlepas dari kenyataan bahwa di antara siswa masih ada yang belum menguasai tata cara berwudhu. Demikian juga, jika siswa belum pernah mempelajari tata cara berwudhu lalu materi yang diberikan langsung membahas tata cara salat maka pada dasarnya materi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya, meskipun mereka ingin mempelajarinya dan secara riil memang membutuhkannya.

Dengan demikian, kebutuhan peserta didik yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dari sudut pandang paedagogik. Secara sederhana, kebutuhan yang dimaksud adalah korelasi antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari pada level sebelumnya.

Pada kurikulum PAI untuk tingkat SLTA tahun 2004 ruang lingkup materinya berfokus pada aspek: Alquran/hadis, keimanan, syari'ah, akhlak, tarikh. Sedangkan kompetensi dasar umum yang harus dicapai meliputi (1) beriman kepada Allah swt. dan lima rukun iman yang lain dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya serta terefleksi dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal; (2) dapat membaca, menulis, dan memahami ayat-ayat Alquran serta mengetahui hukum bacaannya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; (3) mampu beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah; (4) dapat meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Rasulullah, sahabat, dan tabiin serta mampu mengambil hikmah dari sejarah perkembangan Islam untuk kepentingan hidup sehari-hari masa kini dan masa depan; (5) mampu mengamalkan sistem mu'amalat Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2008: 9-10).

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa materi Pendidikan Agama Islam pada tingkat SLTA telah membahas secara rinci pokok-pokok ajaran Islam dengan tiga

domain utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Oleh karena itu, seyogyanya materi-materi tersebut tidak lagi berulang pada tingkat Perguruan Tinggi.

Bahkan, di samping materi-materi pokok yang diajarkan dalam kelas, PAI di tingkat SLTA juga ditunjang dengan kegiatan ekstra-kurikuler. Dalam pedoman kurikulum PAI untuk SLTA ditegaskan bahwa: kegiatan ekstrakurikuler PAI dapat mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan pesantren kilat, imtaq Ramadhan, peringatan hari-hari besar Islam, bakti sosial, salat Jumat, tahun baru Islam, lomba baca tulis Alquran (BTA), dan lain-lain (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2008:16).

Dengan demikian, kebutuhan peserta didik pada tingkat Perguruan Tinggi bukan lagi mengarah kepada persoalan-persoalan yang telah mereka pelajari di bangku SLTA, tetapi perluasan wawasan keislaman terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, baik yang berkembang di dalam negeri maupun dalam dunia internasional,

Uraian materi PAI di atas menunjukkan wawasan yang lebih luas sebagai sebuah pandangan hidup yang dinamis dan selalu berdialog dengan konteks sosial. Tidak lagi mengulang-ulang materi pelajaran SLTA ke bawah yang terbatas pada persoalan-persoalan rukun iman dan rukun Islam, sebagaimana halnya pada kurikulum tahun 2000.

Pendidikan Agama Islam di era sekarang, sebagaimana diungkap al-Faruqi (1968:45), dihadapkan kepada perubahan yang mendasar, terutama mempersiapkan peserta didik yang nantinya akan berintegrasi dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses pendidikan agama, ada dua hal sebagai “pekerjaan rumah (PR)”, terutama pendidik agama Islam, yakni: para pendidik tersebut sudah saatnya membutuhkan pengertian yang mendalam dan harus merasa peka terhadap isu-isu pemahaman keagamaan yang sedang berkembang dalam masyarakat umum. Selanjutnya, para pendidik ini harus bisa membantu peserta didik untuk menyadari pentingnya memahami budaya yang bermacam-macam dalam masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

Jika tidak demikian, tampaknya lembaga pendidikan sulit berpartisipasi dalam menengahi model-model pemahaman Islam radikal yang sering dituduh sebagai penyulut munculnya ketidaknyamanan dalam masyarakat beragama. Lembaga-lembaga pendidikan, terutama di masa akan datang, harus bisa memproduksi sarjana Islam yang berpikiran moderat untuk mewartakan berbagai macam pemahaman yang cenderung radikal itu. Untuk mengujudkan itu, seluruh unsur sistem pendidikan Islam, khususnya pembelajaran agama

Islam, sebaiknya ditelaah kembali⁹. Berbagai upaya untuk mengembangkan materi PAI di Perguruan Tinggi Umum saat ini terus digalakkan dengan mengacu pada spirit yang terkandung dalam kurikulum 2002 tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pendidikan Agama Islam yang berwawasan multikultural.

B. KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum Pendidikan agama Islam adalah suatu proses kegiatan mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Perlu diperhatikan asas-asas kurikulum yaitu asas filosofis, sosiologis, organisatoris dan psikologis. Dan pertimbangan-pertimbangan para ahli pendidikan Islam dalam menentukan atau memilih kurikulum adalah segi agama akhlak dan berikutnya adalah segi kebudayaan dan manfaat.

Sedangkan model pengembangan kurikulum pada Perguruan Tinggi Umum bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pada kurikulum PAI di perguruan tinggi umum pasca pemerintahan Orde Baru, khususnya pada kurikulum PAI tahun 2002. Paradigma yang dikembangkan melihat Islam sebagai sebuah cara pandang yang bersifat dinamis dan responsif terhadap kekinian.

Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada perubahan materi pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum yang tidak lagi mengulang-ulang materi yang ada pada tingkat dasar dan menengah, melainkan lebih akomodatif terhadap isu-isu kontemporer seperti HAM, demokrasi, pluralisme dan masyarakat madani.

Dengan demikian, materi PAI dalam kurikulum tahun 2002 cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di era reformasi ini, di samping juga sejalan dengan kebutuhan peserta didik pada tingkat perguruan tinggi yang memerlukan wawasan keislaman yang lebih luas dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, M. Naquib *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafi
- Wisnucorner.blogs.uny.ac.id diakses pkl 14.30 wib

⁹ Sangkot, 2007 dalam <http://sangkot.wordpress.com>.

GBPP PAI dalam <http://bima.ipb.ac.id>.

Sangkot, 2007 dalam <http://sangkot.wordpress.com>.

<http://www.gp-anshor.org>.

JBP dan Yuli Ahmada, dalam <http://rumahkiri.net>.